DIMENSI POLITIK DARI MISI PEMBEBASAN GEREJA BAGI ORANG MISKIN DAN PEMELIHARAAN ALAM CIPTAAN

Alexander Jebadu

Abstrak:

Church's ministry is to stand in solidarity with the poor, oppressed and to safeguard creation. This call requires the Church –which means all Christians– to get involved in the world's socio-political affairs. Consequently, the Church is and must be political in a broad and noble sense. A prophetic liberative mission of the Church includes promoting love, justice, solidarity and fraternity among the entire human family, defending the dignity of the human person in its fullness and safeguarding the integrity of creation in cooperation with all people of good will. The Church will be in position of supporting the just world's socio-economic and political affairs, but will denounce unjust practices in any form that do not respect the dignity of the human person, destroying livelihoods of the poor or do not safeguard creation as common heritage of humankind. This is to be done without violating the principle of justice and of separation between religion and state.

Kata-kata Kunci:

politik, orang miskin, pastoral, alam ciptaan, Gereja

PENDAHULUAN

Secara historis, misi pembebasan Gereja untuk orang miskin dan mengutuk penyebab- penyebabnya–struktur sosial-ekonomi dan politik yang tidak adil – sudah berusia setua Gereja sendiri. Misi pembebasan ini mempunyai dasarnya dalam misi pembebasan oleh Allah sendiri dalam Alkitab Perjanjian Lama dan dalam pelayanan Yesus dalam Alkitab Perjanjian Baru. Namun komitmen missioner ini baru secara sistematis mulai dirumuskan sebagai doktrin sosial pada 1891 dengan diterbitkannya Ensiklik *Rerum novarum* (Tentang Modal dan Tenaga Kerja) dari Leo XIII. Ensiklik ini, dokumen pertama yang berbicara tentang masalah sosial, ditulis sebagai tanggapan profetis atas masalah sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh badai revolusi industri masa itu.[1] Selama Konsili Vatikan Kedua berlangung (1962-1965), Gereja Katolik menjadi semakin sadar akan kepedulian dan solidaritasnya dengan seluruh umat manusia khususnya dengan masyarakat miskin yang ditindas dan semakin dipermiskin oleh berbagai struktur-struktur ketidakadilan ekonomi dan politik.

Dalam *Gaudium et Spes*, Gereja dipandang sebagai bagian konstitutif dari masyarakat dunia dan karena itu Gereja tidak bisa bersikap diam terhadap pelbagai masalah yang menimpa masyarakat dunia. Bertolak dari pendirian ini, Gereja dalam

Gaudium et Spes menandaskan: "Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan masyarakat dunia zaman ini, terutama yang menimpa mereka yang miskin atau menderita apa saja, maka semua hal ini merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan dari para pengikut Kristus [Gereja] pula. "[2]Selama Konsili Vatikan II juga, sambil tetap sadar untuk tidak mengurusinya secara langsung Gereja percaya bahwa hukum ilahi (*divine law*) mesti menginspirasi tata sosio ekonomi dan politik masyarakat dunia:

> Yang jelas, Kristus tidak memberi Gereja-Nya sebuah misi yang secara langsung menjalankan tatanan politik, ekonomi atau sosial. Tujuan yang Ia letakkan pada Gereja-Nya adalah sebuah misi spiritual. Tapi dari misi spiritual ini, Gereja memberikan sebuah peranan, pencerahan dan energi yang dapat berfungsi untuk mengatur dan mengkonsolidasikan struktur kehidupan masyarakat manusia menurut hukum ilahi. Secara faktual, ketika situasi sungguh menuntut, Gereja dapat dan memang harus memprakarsai aktivitas-aktivitas atas nama semua orang, terutama [aktivitas-aktivitas] yang dirancang bagi orang miskin, seperti karya amal kasih dan usaha-usaha serupa.[3]

Didorong oleh kesadaran baru akan sebuah pastoral yang mendesak untuk menentang ketidakadilan sosial di dunia, Gereja selama Konsili Vatikan II sudah menyarankan pembentukan sebuah lembaga kepausan yang berperan membela dan mempromosikan keadilan dan perdamaian:

> Konsili Vatican II, mengingat masih merajalelanya penderitaan yang masih menimpa sebagian besar umat manusia saat ini, menganggap perlu didirikannya suatu organisme dari Gereja universal agar baik keadilan maupun kasih Kristus terhadap orang-orang miskin bisa dikembangkan di mana-mana. Peran organisme tersebut akan merangsang umat Kristen Katolik untuk mendorong kemajuan di daerah-daerah miskin dan keadilan sosial internasional.[4]

Sebagai tindakan lanjut dari himbuan ini, maka pada tahun 1967 Paulus VI membentuk Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. Dalam sebuah pidato yang diberikannya kepada para anggota komisi ini tanggal 20 April 1967, Paulus VI menggambarkan peran komisi kepausan ini sepertiayam jantan yang ditempatkan di atas puncak tubuh Gereja untuk mengingatkan segenap anggotanya agar selalu waspada dalam melaksanakan seluruh karyanya yang membebaskan, terutama dalam hal keadilan dan perdamaian dalam setiap aspek kehidupan manusia:

> Kalian [Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian] mewakili kita semua dalam merealisasikan setiap suara pemilihan dalam Konsili [Vatikan II] (GS 9). Dewasa ini, seperti di masa lampau, setelah pembangunan sebuah bangunan Gereja atau sebuah menara lonceng Gereja selesai, seekor ayam jantan ditempatkan di atas [puncak candi Gereja] sebagai simbol kesiagaan iman dan seluruh aktivitas hidup Kristiani. Demikian juga dengan Komisi Kepausan ini telah ditempatkan di atas bangunan spiritual Konsili [Vatikan II], dan misinya tak lain daripada membuat mata segenap Gereja untuk tetap terbuka, hatinya sensitif dan tangannya selalu siap untuk karya amal kasih yang mesti direalisasikan di tengah dunia, sehingga dengan demikian Gereja mempromosikan kemajuan bagi orang-orang miskin dan mempromosikan keadilan sosial di antara bangsa-bangsa.[5]

Setelah masa percobaan selama sepuluh tahun, Paulus VI memberi Komisi ini sebuah status yang definitif melalui *Motu Proprio, Justitiam et Pacem* pada tanggal 10 Desember 1976. Pada tanggal 28 Juni 1988, Yohanes Paulus II mengubah namanya dari *Komisi Keadilan dan Perdamaian* menjadi *Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian*. Mengenai tujuan dan tugas utamanya , Konstitusi Apostolik *Pastor Bonus* tahun 1988 mendeskripsinya demikian:

> Tujuan dari Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian adalah untuk mempromosikan keadilan dan perdamaian di dunia sesuai dengan Injil dan ajaran sosial Gereja. 1) Komisi ini akan bertugas untuk membuat studi yang menyeluruh tentang ajaran sosial Gereja dan memastikan bahwa ajaran sosial ini disebarkan secara luas dan dipraktekkan oleh pelbagai kelompok masyarakat, khususnya dalam hubungan antara kelompok tenaga kerja dan manajemen, sebuah relasi yang seharusnya

> semakin dijiwai oleh semangat Injil. 2) Komisi ini berusaha mengumpulkan pelbagai informasi dan penelitian tentang keadilan dan perdamaian, pembangunan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia; Komisi ini akan mereflesikan semua hal ini dan, bila perlu, menyebarluaskan temuan yang dibuatnya dengan kelompok para uskup. Komisi ini memupuk hubungan yang baik dengan oraganisasi-organisasi Katolik internasional dan dengan pelbagai lembaga lain, bahkan dengan organisasi-organisasi lain di luar Gereja Katolik, yang sungguh-sungguh berusaha memperjuangkan perdamaian dan keadilan di dunia. 3) Komisi inibekerja untuk membentuk mental masyarakat agar mereka mencintai perdamaian, terutama pada kesempatan Hari Perdamaian Dunia.[6]

Menyusul pendirian Dewan Kepausan ini, Komisi Keadilan dan Perdamaian yang sama juga perlahan-lahan dibentuk di tingkat nasional dan regional,di keuskupan dan di setiap kongregasi religius di dalam tubuh Gereja Katolik di seluruh dunia. Selama CELAM II di Medellin 1968, misalnya, para Uskup Amerika Latin dengan cepat menyadari adanya kebutuhan untuk mendirikan Komisi Keadilan dan Perdamaian di seluruh Amerika Latin: "Komisi Keadilan dan Perdamaian harus dipromosikan di semua negara [di seluruh Amerika Latin], setidaknya secara nasional,"[7] yang kemudian mendorong lahirnya teologi pembebasan di benua ini. Di tingkat kepausan, komisi ini tetap disebut Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, sedangkan di dalam tarekat-tarekat religius dan di tingkat keuskupan Gereja Katolik, sejak tahun 1990-an Komisiini – mengikuti jejak Gereja-Gereja Protestan – telah berganti nama menjadi Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KKPKC) atau *Commission for Justice, Peace and Integrity of Creation* (JPIC). Perubahan nama ini menunjukkan sebuah relasi sangat erat antara keadilan dan lingkungan hidup, antara pilihan untuk memihak orang miskin dan pilihan untuk memelihara alam ciptaan. Amanat misi dari Komisi JPIC dari kongregasi religius dan keuskupan berpola pada amanat misi dari Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian.

Singkat kata, selama lima puluh tahun terakhir sejak Konsili Vatikan II, komitmen kenabian Gereja Katolik dan Gereja-Gereja Protestan telah berkisar pada dan dikoordinasikan oleh Komisi JPIC. Dalam rangka membebaskan kaum miskin, menjaga keutuhan alam ciptaan dan mencela pelbagai bentuk ketidakadilan sosial-ekonomi dan politik dunia, Gereja tanpa bisa dihindari, sambil bekerjasama dengan penganut agama lain dan semua orang yang berkehendak baik, mesti menghadapi masalah sosial, ekonomi dan politik dunia dengan ikut aktif berpolitik namun tanpa harus mengambil alih struktur sosial, ekonomi dan politik dunia itu sendiri.

PROBLEM: APAKAH GEREJA SEHARUSNYA BERPOLITIK?

Namun sebuah pertanyaan yang sering diajukan banyak orang adalah: Dapatkah Gereja berpolitik? Atau mengapa Gereja mesti terlibat dalam urusan sosial, ekonomi dan politik dunia? Tanpa berpikir panjang, banyak orang dewasa ini, baik orang Kristen, rohaniwan-rohaniwati maupun umat awam Katolik sendiri, dengan cepat menjawab "tidak". Alasannya adalah bahwa Gereja, kata mereka, tidak bersifat politik dan karena itu tidak bisa terlibat dalam urusan-urusan sosial, ekonomi dan politik. Mereka berpendapat bahwa ada pemisahan antara agama dan negara atau antara Gereja dan politik. Gereja dipanggil hanya untuk urus hal rohani, sedamg masalah sosial, ekonomi dan politik adalah ranah dari pemerintah negara. Contoh pandangan seperti ini tak susah dicari.

Gereja Katolik di Pulau Flores, misalnya, telah menuaikan pelayanan kenabiannya dengan bersikap solider dengan masyarakat petani-petani miskin di pulau ini dan sekitarnya dalam perjuangan mereka mempertahankan hak-hak atas tanah pertanian dari serbuan sekelompok orang super kaya negara-negara industri yang dieksekusi oleh perusahaan-perusahaan transnasional di bidang pertambangan (*Transnational Mining Corporations*, selanjutnya TNMCs) yang didorong oleh sistem ekonomi neoliberal saat ini. Setelah bersekongkol dengan pemerintahan daerah, TNMCs tanpa ampun hancurkan secara permanen lahan perta-

nian mereka dan kantong-kantong hutan penyangga hujan yang masih sisa. Mereka mencemari sungai dan laut serta mengeringkan mata air sebagai sumber air minum dan irigasi untuk sawah-ladang mereka. Gereja Katolik Flores yang telah mengadvokasi masyarakat petani pedesaan di pulau ini telah dituduh mencampuri urusan pemerintah Indonesia dan diminta untuk keluar dari ranah ini. Para pastor dan suster yang berdiri dipihak petani desa dicap provokator.

Pemerintah daerah di Flores, yang sebagian besar mengaku beriman Katolik, berpendapat bahwa masalah sosial, ekonomi dan politik adalah wewenang negara. Atas dasar ini, mereka menyerukan agar Gereja berhenti mencampuri kebijakan publik negara khususnya yang berkaitan dengan industri pertambangan, meskipun fakta menunjukkan bahwa proyek ini dioperasikan dengan menghancurkan sumber-sumber hidup – tanah pertanian, hutan dan sungai – secara masif dan permanen, serta penuh dengan mafia penipuan dan ketidakjujuran.[8] Pemerintah daerah Flores bersikeras bahwa Gereja, khususnya hirarkinya – para uskup dan pastor dan biarawan-biarawati – mesti hanya mengurusi bidang yang menjadi wewenangnya yaitu hal rohani. Gereja hanya membantu umat Kristen untuk masuk surga dengan mengajarkan mereka berdoa dan layani mereka dengan sakramen-sakramen suci.

Tuduhan dan pandangan semacam ini, tentu saja, tidak unik dialami oleh Gereja di Flores. Hal yang sama merupakan tantangan umum yang dihadapi oleh Gereja di mana saja di dunia sehubungan dengan misi kenabiannya untuk berdiri di pihak orang miskin yang hak hidupnya dirampas dan menjaga keutuhan alam ciptaan. Sekedar untuk menyebutkan sebuah contoh lain, ketika teologi pembebasan lahir di Amerika Latin pada tahun 1970-an, Gereja di sana juga menghadapi kesulitan yang sama seperti diceriterakan Leo Boff dalam bukunya *Church,Charism and Power: Liberation Theology and the Institutional Church*:

> Ketika orang berbicara tentang ketidakadilan sosial dan pembebasan, [sesungguhnya] orang itu sudah menempatkan dirinya di dalam inti persoalan mengenai masalah dominasi politik. Tetapi [mesti diakui], tidak ada kata yang lebih ambigu [dewasa ini] daripada kata "politik". Kekuatan-kekuatan reaksioner di dalam Gereja sendiri dan di dalam masyarakat pada umumnya mendapat keuntungan dari ambiguitas pemahahaman kata ini untuk membebaskan diri mereka dari panggilan untuk menegakkan keadilan. Kita membaca kepala berita surat kabar seperti "Gereja tidak boleh terlibat dalam politik," "Paus melarang para pastor dan uskup dari keterlibatan dalam politik," "Tidak ada politik dalam Perayaan Misa," [atau] "Tidak ada politik di gedung-gedung gereja." [Tapi persoalannya], apa persis sebenarnya yang dimaksudkan dengan kata "politik" itu?[9]

ALASAN FUNDAMENTAL DARI DIMENSI POLITIK GEREJA

Bertentangan dengan yang diklaim banyak orang, Leo Boff berpendapat bahwa dari kodrat pelayanannya Gereja bersifat politik.Berhadapan dengan fakta ketidakadilan sosial, Gereja mesti bersifat politis dan tidak bisa apolitis. Seperti Leo Boff, Antonio Egiguren OFM, dalam sebuah tulisan yang diterbitkan SEDOS November 2012, juga mengatakan: "Apa yang membuat Gereja menjadi sebuah lembaga non-kredibel adalah keterlibatannya dalam politik dan keberpihakannya dengan kekuasaan ... [Tapi kebenarannya adalah bahwa] Gereja perlu berpolitik, memihak orang miskin dengan tujuan untuk membangun sebuah masyarakat yang lebih baik."[10]

Tapi pertanyaannya adalah di sini. Bagaimana dimensi politik dari pelayanan Gereja ini harus dipahami dalam kerangka iman Kristen? Atau dengan kata lain, mengapa Gereja harus berpolitik atau bersifat politik? Mendiang Uskup Romero, pahlawan orang-orang miskin yang haknya dicabik pemerintah negara El Salvador hingga tahun 1970-an, memberikan salah satu jawabannya.

Berdasarkan pada pengalamannya tentang bagaimana menjelmakan Gereja dalam kehidupan orang miskin dan gigih membela orang miskin yang ditindas struktur ekonomi dan politik yang tidak adil di El Salvador

hingga tahun 1980-an, Uskup Romero mengatakan bahwa keyakinan iman dan transendensi nilai-nilai Injil adalah kekuatan yang membimbing dan menopang Gereja untuk berdiri tegak dan terlibat dalam persoalan-persoalan ini Uskup. Romero menunjukkan tiga aspek fundamental iman Kristen untuk berinkarnasi di dunia sosial-politik dan ekonomi, yaitu kesadaran baru tentang dosa, kelanjutan dari inkarnasi kasih Allah Yesus Kristus, dan sebuah iman yang lebih dalam akan Allah.

Kesadaran Baru atas Dampak Dosa Sosial

Menurut Uskup Romero, dalam tradisi Kristen secara konvensional dosa dimengerti sebagai perbuatan menentang Allah dengan akibat kematian bagi setiap manusia yang melakukannya. Dalam refleksi tradisional tentang dosa berat (*mortal sin*), Gereja berkecenderungan untuk menekankan akibat permanen dari dosa bagi pendosa, misalnya, dalam bentuk kehilangan kebahagiaan abadi bersama Allah di hidup akhirat setelah kematian badan. Artinya, oleh dosa berat ini pendosa akan menderita lamanya karena ia tidak akan pernah bisa memandang wajah Allah. Akan tetapi, akar utama dari dosa, terutama dosa-dosa yang terlembaga dalam sistem sosial-ekonomi dan politik yang tidak adil dan konsekuensi-konsekuensinya sangat berat bagi sesama manusia, sering tidak mendapat perhatian yang memadai dalam refleksi tradisional Gereja.

Uskup Romero mengatakan bahwa hal ini merupakan kekurangan dari teologi masa lalu tentang dosa. Untuk mengatasi kekurangan ini, Gereja harus memberikan perhatian yang proporsional terhadap efek yang mematikan dari dosa berat pada kehidupan material dari sesama manusia selama hidup sekarang ini dan secara profetis mesti menentang akar penyebabnya yang yang melekat di dalam struktur sosio-ekonomi dan politik. Dengan demikian, Gereja tidak bisa tidak harus terlibat dalam politik dan memainkan perannya dalam politik. Uskup Romero mengatakan bahwa sebuah dosa itu sungguh mematikan tidak hanya dalam arti kematian interior (*interior death*) dari pendosa tetapi terutama karena dampak negatif yang ditimbulkannya *hic et nunc* – saat ini dan di sini – terhadap sesama manusia. Menyaksikan merajalelanya dosa berat (*mortal sin*)seperti ini, Gereja tidak bisa berdiri diam tetapi harus terlibat di dalam struktur sosio-ekonomi dan politik serta menentang akar-akar penyebabnya. Tentang hal ini Uskup Romero lebih lanjut menulis:

> Dosa seperti itu sungguh-sungguh mematikan, tidak hanya dalam arti kematian interior dari orang yang berbuat dosa, tetapi juga karena kematian nyata…yang ditimbulkannya …. Sebuah fakta dasar dari iman Kristen kita: dosa telah membunuh Anak Allah [Yesus yang disalibkan karena dosa-dosa manusia], dan dosa yang sama juga sedang membunuh anak-anak Allah [umat Kristen atau siapa saja yang sedang ditindas]… Orang [pendosa] tidak mungkin menghina atau menentang Allah tanpa pada saat yang sama melukai kehidupan saudara atau saudari dari pendosa tersebut …. Apa yang saya lakukan ini bukan hanya masalah rutin, yaitu bahwa dengan keras saya menentang sekali lagi eksistensi struktur-struktur dosa di negara kita [El Salvador]. Mereka [struktur-struktur sosio-ekonomi dan politik] adalah dosa karena mereka mengakibatkan buah-buah dosa: yaitu kematian rakyat Salvador …. Itu sebabnya kami telah mengecam apa yang di negara kami telah menjadi berhala harta kekayaan material (*idolatry of wealth*), berhala hak absolut (*idolatry of absolut right)* yang dipraktekkan dalam sistem kapitalis sehubungan dengan kepemilikan harta benda pribadi, berhala kekuasaan politik (*idolatry of political power*) dalam rezim Keamanan Naional, yang atas alasan ini keamanan pribadi [para penguasa] justru dilembagakan. Tidak peduli betapapun mungkin akan sangat tragis kelihatannya, Gereja melalui keterlibatannya didalam dunia sosial-ekonomi dan politik telah belajar bagaimana mengetahui dan bagaimana memperdalam pemahamannya tentang hakekat dosa (*the essence of sin*). Hakekat paling dasar dari dosa, di dalam dunia kita, terungkap dengan jelas dalam kematian rakyat Salvador.[11]

Keberlanjutan dari Inkarnasi Allah yang Menyelamatkan

Alasan fundamental kedua mengapa Gereja bersifat politis dan harus berpolitik adalah kodrat misionernya untuk melanjutkan inkarnasi keselamatan Allah dalam diri

Yesus Kristus. Seperti Yesus Allah yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara manusia, terlibat dalam segala hal, termasuk terlibat dalam struktur-struktur sosial-ekonomi dan politik manusia pada zaman-Nya kecuali dalam hal dosa (*God's incarnation*), Gereja juga dari kodratnya dipanggil untuk melanjutkan inkarnasi Allah ini di dalam dunia dengan melibatkan diri dalam masalah-masalah dunia. Gereja ada di dalam dunia dan hidup di tengah tatanan sosio-ekonomi dan politik dunia. Sambil mendukung semua hal yang baik dari tata ekonomi dan politik dunia, Gereja tidak bisa berdiam diri. Ia harus bangkit berdiri menentang struktur sosial ekonomi dan politik manakala ia menjadi eksploitatif dan menindas manusia sendiri, terutama mereka yang lemah dan miskin dan nyata-nyata merusakkan alam., Dalam melakukan hal ini Gereja sesungguhnya sudah berpolitik. Karena itu, Uskup Romero telah menyerukan agar Gereja menjelmakan dirinya ke dalam usaha pemihakan terhadap kaum miskin:

> Kita sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang artinya inkarnasi, tentang apa artinya mengatakan bahwa Yesus sungguh mengambil rupa kedagingan manusia dan membuat dirinya satu dengan saudara-saudarinya dalam penderitaan, menangis dan meratap ... [Di sini] saya tidak sedang berbicara tentang inkarnasi yang universal. Ini tidak mungkin. [Melainkan] saya sedang berbicara tentang inkarnasi yang istimewa dan parsial: yaitu inkarnasi di dalam dunia orang miskin. Dari perspektif itu, Gereja akan menjadi Gereja untuk setiap orang. Gereja inkarnatoris yang demikian akan menawarkan pelayanannya bagi yang perkasa juga melalui karya kerasulan untuk tobatkan mereka – tetapi tidak sebaliknya, seperti yang telah sering terjadi di masa lampau. Dunia orang miskin, dengan karakteristik sosial dan politiknya yang konkret, mengajarkan kita di mana Gereja seharusnya dapat menjelmakan dirinya sedemikian rupa sehingga Gereja akan menghindari universalisme palsu yang cenderung menggiring Gereja untuk mengasosiasikan dirinya dengan para penguasa yang kuat perkasa. Dunia orang miskin mengajarkan kita apa hakekat cinta kasih Kristiani – [Cinta Kristiani adalah] sebuah cinta yang senantiasa mencari perdamaian tapi juga membongkar pasifisme palsu – pasifisme yang dibuat dengan mengundurkan diri dan tidak aktif [dalam mencari solusi dari persoalan-persoalan kemanusiaan yang berakar pada struktur sosial yang tidak adil].[12]

Iman akan Allah yang Semakin Benar dan Dalam

Alasan fundamental ketiga bagi Gereja untuk berpolitik adalah imannya akan Allah yang hidup. Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa kepenuhan hidup bagi semua orang tanpa kecuali dan ingin agar mereka sungguh memperoleh kepenuhan hidup sebagai manusia. Menurut Uskup Romero, kebenaran iman iniakan menjadi sungguh nyata dan radikal ketika Gereja masuk ke dalam soal-soal yang menyangkut hidup dan mati dari umatnya (*the heart of life and death of its people*). Dalam situasi seperti ini, Gereja menghadapi dua pilihan: entah memilih memihak kehidupan atau memilih mendukung kematian orang miskin yang dieksploitasi. Bagi Gereja Kristus, bersikap netral di dalam situasi ini adalah sebuah pilihan yang tak mungkin.[13] Dengan kata lain, tidak ada pilihan lain bagi Gereja selain memilih memihak orang miskin yang tertindas dan dengan melakukan hal ini Gereja sudah sedang berpolitik. Gereja berpolitik dengan mencela dan menyerukan kutukan bagi penyebab utama kemiskinan dari orang miskin, yakni sistem sosio-ekonomi dan politik yang tidak adil. Tentang hal ini Uskup Romero lebih lanjut menulis:

> Ketika Gereja memasukkan dirinya ke dalam dunia sosial-politik ia melakukan hal ini dengan tujuan agar dapat bekerja dengannya sehingga dari kerjasama tersebut, sebuah kehidupan bisa dianugerahkan kepada kaum orang miskin. Dengan berpolitik seperti ini, Gereja tidak menjauhkan diri dari misinya yang sebenarnya, dan ia juga tidak sedang melakukan sebuah karya yang sifatnya sekunder atau sesuatu yang sifatnya kebetulan. [Sebaliknya], Gereja justru sedang memberi kesaksian tentang imannya kepada Allah; Gereja sedang menjadi instrumen dari Roh Allah pemberi kehidupan .... Sebagai Gereja, kami bukan ahli [politik], juga kami tidak ingin memanipulasi politik yang memiliki mekanisme internalnya tersendiri. Akan tetapi masuk ke dalam dunia politik, masuk ke dalam dunia di mana hidup dan

> kematian sebagian besar anggota sebuah masyarakat manusia diputuskan, merupakan sebuah pilihan yang mendesak jika kita mau melestarikan, tidak hanya dalam kata tetapi dalam perbuatan, iman dalam Allah yang hidup dan mengikuti jejak Yesus.[14]

MAKNA DIMENSI POLITIK GEREJA

Dalam percakapan umum, terutama dalam dunia sekuler, politik sering diasosiasikan dengan sesuatu yang kotor atau tidak jujur.Politik sering dimengerti sebagai hal yang berkaitan dengan kebohongan atau propaganda yang melibatkan korupsi, manipulasi dan perjuangan untuk kepentingan kelompok sendiri. Namun, seperti diingatkan Leo Boff, politik yang dimengeri demikian adalah politik yang sudah rusak atau politik yang telah menjadi patologis. Politik dalam pengertian dan tujuannya yang asli adalah sangat mulia dan positif seperti yang diajarkan pemikir Aristoteles bahwa manusia dari kodratnya adalah makhluk politis (*political animals*).[15]Karena bagi Aristoteles, politik tidak lain dari pengorganisasian dari kebutuhan hidup sosial manusia. Sehingga menurut dia, politik merupakan kodrat dasar makhluk manusia yang yang adalah makluk pribadi dan sekaligus sosial.[16] Ketika Gereja berbicara tentang dirinya sebagai entitas yang politis, maka ia berbicara tentang politik dalam arti positif seperti yang diajarkan oleh pemikir Aristoteles dan secara profetis mencela patologi-patologinya yang membelenggu manusia.

Gereja Berpolitik sebagai Respon terhadap Kebutuhan Sosial Politik Dunia

Dalam pengertian positif, politik sesungguhnya sangat fundamental bagi iman Kristen.Ke dalam politik dalam arti positif ini Gereja dipanggil untuk terlibat mempromosikan Injil kasih, namun tanpa harus menjadikan sebagai salah satu entitas yang secara langsung bersaing dengan lembaga-lembaga politik partisan. Seperti dijelaskan oleh Uskup Romero, politik bagi Gereja tidak lain daripada sebuah tanggapan Gereja terhadap masalah ketakadilan sosial ekonomi dan politik yang di dalamnya Gereja ada dan hidup.[17] Tentang hal ini Romero menjelaskannya demikian:

> Tuntutan [untuk berpolitik] ini merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi iman, dan Gereja tidak dapat mengabaikannya [dimensi politik dari iman] begitu saja.Tapi hal itu tidak berarti bahwa Gereja harus memerankan dirinya sebagai sebuah lembaga politik yang masuk dan ikut secara langsung bersaing dengan lembaga-lembaga politik lainnya atau bahwa Gereja memiliki proses politik sendiri. Juga hal itu tidak berarti bahwa Gereja kita berusaha mencari kepemimpinan politik. [Sebaliknya] saya sedang berbicara tentang sesuatu [politik] yang lebih dalam, sesuatu [politik] yang lebih sesuai dengan Injil. Saya berbicara tentang sebuah opsi yang otentik bagi kaum miskin, tentang bagaimana Gereja menginkarnasikan dirinya di dalam dunia mereka [kaum miskin], tentang bagaimana memberitakan Injil kepada mereka, tentang bagaimana memberi mereka harapan, tentang bagaimana mendorong mereka untuk terlibat dalam praksis-praksis yang membebaskan, tentang bagaimana membela kepentingan hidup mereka dan berbela rasa dengan nasib mereka. Opsi Gereja bagi masyarakat miskin menyingkapkan dimensi politik dari iman Kristiani dalam hal-hal yang sangat fundamental…. Karena Gereja telah memilih untuk memihak mereka yang sungguh miskin…, maka Gereja hidup dalam dunia politik dan Gereja mewujudkan kepenuhan eksistensi dirinya sebagai Gereja juga melalui politik.[18]

Dengan kata lain, bagi Gereja, terlibat dalam politik tidak lain berarti secara profetis memihak kaum miskin dan bersikap solider dengan mereka, dan mengecam setiap struktur sosial sebagai penyebabnya. Dengan demikian, bersifat politis bagi Gereja adalah sebuah panggilan yang mulia dan menjadi bagian konstitutif dari pelayanan kenabiannya.

Gereja Berpolitik untuk Menegakkan Keadilan

Bagi Gereja, dimensi politiknya lahir dari dan bertujuan untuk membela dan menegakkan keadilan bagi semua orang –perlindungan martabat setiap pribadi manusia dan integritas alam ciptaan sebagai sumber hidup manusia – seperti yang direncanakan oleh Allah pencipta. Sebagai sebuah kelanjutan dari misi pembebasan dari Allah (*missio Dei*), salah satu alasan keberadaan

(*raisond'etres*) Gereja adalah untuk menegakkan keadilan dan membebaskan umat manusia dari semua bentuk penindasan, sebagaimana ditegaskan oleh documen Sinode Para Uskup Katolik sedunia tahun 1971*Justuce in the World*::

> Karya atas nama keadilan dan partisipasi dalam usaha transformasi dunia sungguh merupakan sebuah dimensi konstitutif dari pewartaan Injil, atau dengan kata lain, merupakan bagian dari misi Gereja untuk penebusan umat manusia dan pembebasannya dari setiap situasi yang menindas..... *Gereja telah menerima dari Kristus misi memberitakan pesan Injil*, yang mengandung sebuah panggilan agar orang berpaling dari dosa kepada kasih Bapa, kepada kekerabatan universal dan kepada *tuntutan akan keadilan di dunia*. Inilah yang menjadi alasan mengapa *Gereja mempunyai hak, bahkan tugas, untuk memaklumkan keadilan pada tingkat sosial, nasional dan internasional, dan untuk mengecam kasus-kasus ketidak-adilan di mana hak-hak asasi dari masyarakat dan keselamatan mereka sangat menuntutnya* [Huruf miring berasal dari saya].[19]

Mengomentari dokumen dari Sinode para uskup yang dikutip di atas, Leo Boff mengatakan bahwa para uskup dalam dokumen ini melihat keadilan sebagai bagian *konstitutif* dari karya pewartaan Injil Kristus untuk membebaskan umat manusia dari setiap situasi yang menindas. Oleh karena itu, tidak ada Injil Yesus Kristus tanpa pewartaan tentang keadilan. Akan tetapi, Leonardo mencatat bahwa, hal ini tidak berarti kita mau mempolitisasikan Gereja tapi hanya sebuah sikap setia kepada Injil. Jika kita tidak setia, kita memutilasi inti pesan Injil Yesus dan dengan demikian kita sesungguhnya mengkhianati misi Gereja itu sendiri.[20]

Dimensi Politik Gereja Mengalir dari Inti Iman Kristen

Di Puebla, para uskup Katolik mengklaim bahwa kehadiran politik Gereja di dunia bahkan mengalir dari inti iman Kristen: "Sungguh, kebutuhan akan kehadiran Gereja dalam politik berasal dari kedalaman iman Kristen sendiri: ke-Allahan Kristus meluas selama-lamanya. Kristus memeterai persaudaraan akhir dari seluruh umat manusia, setiap pribadi manusia adalah sama baiknya dengan setiap pribadi yang lain: "Kalian semua adalah satu di dalam Kristus Yesus" (Gal 3:28).[21]

Mengomentari Dokumen Puebla No.516, Leo Boff mengatakan bahwa Gereja akhirnya menegaskan bahwa pemahaman tentang kekuasaan Yesus sebagai Tuhan juga merangkum ranah politik. Karena pada dasarnya Yesus adalah Tuhan atas segala sesuatu, termasuk Tuhan atas tata dunia sosial ekonomi dan politik. Selain itu, politik juga bisa ditelusuri hingga ke inti dari komitmen pelayanan misioner Gereja untuk melayani Kerajaan Allah. Tentang hal , Leo Boff menulis:

> [Di Dokumen Puebla No.615] politik dipaha-mi dalam konteks Ketuhanan Yesus Kristus. Ia tidak hanya Tuhan atas tempat-tempt kecil seperti hati , jiwa atau Gereja. Ia adalah Tuhan atas seluruh alam semesta, atas hal-hal besar seperti politik. Politik seharusnya berhubungan dengan Kerajaan Allah karena *ia harus berhubungan dengan keadilan, sebuah kebaikan mesianis* [huruf miring di sini adalah dari saya]. Umat Kristen perdana yang mengaku "Yesus adalah Tuhan" [sebenarnya] sedang membuat sebuah pernyataan politik.[22]

Berdasarkan ajaran Gereja dalam *Lumen Gentium* No. 34 dan *Octogesima adveniens* No. 46, Leo Boff lebih lanjut mengatakan bahwa minat Gereja dalam politik merupakan sebuah jalan untuk menyembah Tuhan dan dengan melakukan hal demikian Gereja menguduskan dunia bagi Allah. Bagi Gereja, mempraktikkan politik berarti memperjuangkan keadilan bagi semua orang dan perjuangan ini memuliakan Allah sendiri. Dengan demikian, komitmen politik Gereja merupakan ekspresi cinta Kristiani yang sejati bagi sesama teruama mereka yang miskin dan tertindas.[23]

Namun untuk menghindari kebingungan mengenai politik yang dimaksud oleh Gereja dan politik yang dipraktekkan oleh negara, para uskup di Puebla membedakan dengan jelas antara politik dalam arti mulia (*politics in a noble sense*) dan politik sebagai partai politik [*politics as party politics*]. Leo

Boff memberi kedua bentuk politik ini masing-masing dengan sebuah nama: Politik dengan huruf besar P dan politik dengan huruf kecil p.[24]

Politik dengan Huruf Besar "P"

Pertama, politik dalam arti yang mulia dengan huruf besar P adalah politik yang bertujuan: 1) mencari dan mengejar kesejahteraan bersama (*common good*), mempromosikan keadilan dan hak asasi manusia, mengutuk korupsi dan kekerasan terhadap manusia dan alam ciptaan, baik regional, nasional maupun internasional. Politik dalam arti yang mulia (2) merincikan nilai-nilai fundamental dari seluruh masyarakat manusia seperti harmoni secara ke dalam (*internal harmony*) dan keamanan secara keluar (*external security*). Politik dalam arti luas juga (3) mendamaikan kesetaraan dengan kebebasan (*equality with freedom*), otoritas publik dengan otonomi yang sah dan partisipasi dari semua anggota kelompok masyarakat. Politik dalam arti yang luas bertugas untuk mendefinisikan cara-cara dan etika hubungan sosial. Para uskup di Puebla menegaskan bahwa politik dalam artiluas inilah yang merupakan interese Gereja dan menjadi bagian konstitutif dari karyapewartaan Injil dan interese dari para pastor sebagaipelayan persatuan.[25]

Dalam konsep Politik yang luas ini, Gereja mempromosikan nilai-nilai luhur untuk menuntun dunia politik dengan huruf kecil p, dan memantau serta menafsir aspirasi rakyat setiap bangsa, terutama aspirasi dari kelompok masyarakat yang secara sistematis dimarginalisasikan oleh negara mereka. Hal ini dilakukan Gereja melalui kesaksian Injil, ajaran dan berbagai bentuk pelayanan pastoral.[26] Dengan demikian, seluruh ajaran sosial Gereja dan Injil itu sendiri adalah Politik dalam arti yang luas dan mulia. Tentang hal ini Leo Boff membuat sebuah komentar yang cukup keras:

> Gereja mempunyai pandangannya tersendiri tentang dunia, tentang manusia, tentang kehidupan sosial, tentang distribusi barang kebutuhan hidup manusia dan sebagainya. Dengan mewartakan Injil, Gereja sesungguhnya sedang memaklumkan Politik Injil; Gereja memiliki interese dalam Politik dan pada masa lampau Gereja senantiasa memiliki interese ini. Gereja tidak bisa berhenti untuk terlibat dalam Politik; ia tidak bisa bersikap tidak peduli terhadap keadilan atau ketidakadilan sosial dan juga Gereja tidak bisa berdiam diri di hadapan kenyataan di mana sekelompok masyarakat manusia jelas-jelas dieksploitasi. Tidak ada ruang untuk bersikap netral dalam Politik [dengan huruf besar P]; entah orang harus mengubah ke arah sebuah partisipasi sosial yang lebih besar atau orang memilih untuk tetap mendukung *status quo* [yang umumnya tidak adil], yang di banyak negara memarginalisazikan sebagian besar anggota masyarakatnya.[27]

Apa yang diutarakan Leo Boff bukan sesuatu yang berlebihan. Dalam dokumen yang sama, sebuah sikap yang *a politis*, yaitu sikap tidak peduli terhadap kebaikan bersama (*common good*) dan keadilan sosial, apakah mereka itu adalah para pastor, biarawan-biarawati atau umat awam, dikritik sebagai sikap tidak terpuji:

> Kekristenan mesti menginjili seluruh eksistensi manusia termasuk dimensi politiknya. Gereja, oleh karenanya, harus mengkritik orang-orang Kristen yang cenderung membatasi imannya hanya pada kehidupan pribadi atau keluarga, tidak meliputi juga profesi, tatanan ekonomi, sosial dan politik mereka, seolah-olah di sana [di tempat kerja, ekonomi dan politik] dosa, cinta, doa dan pengampunan tidak memiliki relevansinya.[28]

> Ideologi-ideologi dan partai-partai politik, dalam mengusulkan sebuah visi yang absolut tentang manusia, ….berusaha menggunakan Gereja… Manipulasi [terhadap Gereja] ini, yang selalu merupakan sebuah risiko dalam kehidupan politik, bisa berasal dari orang Kristen sendiri dan bahkan bisa datang dari para pastor dan kaum biarawan-biarawati, ketika mereka mewartakan Injil tanpa mengaitkannya dengan masalah ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dalam kenyataannya, mutilasi Injil ini [keterpisahan antara Injil dari masalah ketakdilan sosial] bisa berarti semacam kolusi dengan tata kepemerintahaan [yang tidak adil], sekalipun hal ini bisa terjadi secara tidak sadar.[29]

Oleh karena itu, dari sudut pandang Politik Injil, maka tidak ada ruang untuk

bersikap netral. Bagi politik Injil, bersikap netral di dalam situasi tak adil merupakan sebuah pilihan mustahil. Mengomentari Puebla No. 515 dan No. 558 yang dikutip di atas, Leo Boff mengatakan bahwa bersikap *apolitis* dalam Politik dengan huruf besarl P sama dengan memanipulasi dan memutilasi Injil Yesus Kristus. Setiap orang Kristen sejati perlu menjadi lebih sadar akan dimensi politik dari Injil dan iman Kristen. Politik sebagai sebuah pemakluman Injil kasih, solidaritas dan keadilan mempunyai tempat yang layak di atas mimbar dan dalam Perayaan Misa.[30] Tentang hal ini Leo Boff lebih lanjut mengatakan: "Jika kotbah kita tidak menyentuh tema-tema tentang keadilan, ketakadilan, persaudaraan dan partisipasi [demokrasi], jika mereka [kotbah-kotbah] tidak mencela tindakan kekerasan, maka mereka sedang memutilasi Injil dan membuang …. kabar baik dari Yesus Kristus."[31]

Politik dengan Huruf Kecil "p"

Politik jenis kedua yang diidentifikasi dengan huruf kecil p oleh Leo Boff adalah semua kegiatan politik yang sesuai dengan administrasi dari sebuah masyarakat melalui pelaksanaan kekuasaan oleh sebuah negara demokratis. Tentang politik jenis kedua ini, para uskup di Puebla mengajarkan demikian:

> Realisasi dari tugas politik yang fundamental biasanya dilakukan oleh kelompok warga negara yang ingin memperoleh dan menggunakan kekuatan politik untuk menyelesaikan masalah ekonomi, politik dan sosial seturut cara atau ideologi mereka sendiri. Dalam hal ini, orang dapat berbicara tentang "partai-partai politik". Sekarang, meskipun ideologi-ideologi yang diusung oleh kelompok-kelompok warga masyarakat ini mungkin diinspirasi oleh ajaran sosial Kristen, mereka mungkin akan tetap berakhir dengan kesimpulan yang berbeda [dari dan berseberangan dengan nilai Injil kasih, keadilan dan persudaraan]. Oleh karena itu, walau diinspirasi sangat dalam oleh ajaran Gereja, tetap tidak ada partai politik yang dapat mengklaim hak untuk mewakili semua umat beriman. Karena bagaimanapun program konkret dari sebuah partai politik tetap tidak akanpernah memiliki nilai mutlak bagi semua orang.[32]

Politik dengan huruf p kecil, yang dieksekusikan melalui partai politik dan dijalankan dengan melalui pemerintahan negara, tidak melibatkan seluruh Gereja tapi hanya kaum awam. Dalam Gereja Katolik, praktik politik dalam bentuk melibatkan diri dalam partai politik dan mengambil bagian dalam administrasi kepemerintahan negara merupakanruang yang tepat bagi umat awam. Mewujudkan komitmen politik dengan huruf p kecil adalah tugas kaum awam. Tentang hal ini para Uskup di Puebla menegaskan: "Politik partisan adalah ranah kaum awam (bdk. *GS*No. 43). Sesuai dengan status awam mereka, mereka dapat mendirikan …. partai-partai politik, ideologi dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan mereka secara sah."[33]

Sebagai bagian dari hirarki Gereja dan sebuah lembaga kenabian, di dalam kegiatan partai-partai politik inilah para uskup, para pastor,, biarawan dan biarawati, baik sebagai kelompok maupun sebagai individu, tidak bisa melibatkan diri di dalamnya. Mereka tetap tinggal sebagai pelayan persatuan (*ministers of unity*)dan menawarkan bimbingan moral bagi semua orang. Para uskup di Puebla merumuskan hal ini demikian:

> Para pastor, …, harus tunduk pada usaha penyangkalah diri di sini. Jika mereka mengambil bagian secara aktif dalam partai-partai politik, mereka akan menanggung risiko memutlakkan dan meradikalisasikan kegiatan politik partisan tersebut, karena panggilan mereka adalah untuk menjadi "orang-orang dari yang Mutlak [Tuhan Allah]." [Puebla mengutip Dokumen Medellin 1968 No. 19 tentang para pastor]: "Tapi dalam tatanan ekonomi dan sosial dan terutama dalam tatanan politik, di mana beberapa opsi khusus ditawarkan, para pastor seperti itu seharusnya tidak secara langsung menyibukkan diri mereka dengan keputusan-keputusan atau kepemimpinan atau mekanisme-mekanisme solusinya."[Puebla mengutip Sinode Uskup Sedunia Tahun 1971 di Bagian 2 No. 2]: "Kepemimpinan atau militansi aktif atas nama partai politik harus dijauhkan dari setiap pastor kecuali, dalam keadaan yang konkret dan luar biasa, hal itu benar-benar diperoleh atas keinginan dari masyarakat dan memperoleh persetujuan dari Uskup setelah berkonsultasi dengan Dewan Para Imam

> dan, jika keadaan menuntut, dengan persetujuan Konferensi Waligereja." Sesungguhnya, tren Gereja saat ini tidak sedang mengarah ke sana.[34]
>
> Berdasarkan kebajikan bagaimana mereka mengikuti Kristus ... pria dan wanita religius [biarawan-biarawati] juga bekerjasama dalam menginjili tatanan dunia politik. Hidup dalam sebuah masyarakat yang jauh dari praktek persaudaraan, ... mereka juga harus menahan diri dari godaan untuk terlibat secara langsung dalam partai-partai politik, sehingga mereka tidak menciptakan kebingungan antara nilai-nilai Injil dan beberapa ideologi yang spesifik [yang diusung oleh partai-partai politik].[35]

TANGGUNGJAWAB POLITIK DARI HIRARKI DAN AWAM

Konkretnya, bagaimana Gereja menjalankan misi pembebasan politik Injil ini? Gereja Katolik, yang anggotanya melampaui batas-batas negara, bangsa, suku dan ras, pada dasarnya diorganisir dalam tiga kelompok besar: kaum awam, biarawan-biarawati dan hirarki. Leo Boff menjelaskan hal ini demikian: "Hirarki [dimulai] dari Paus hingga diakon; kaum awam [adalah semua mereka] yang dibaptis tetapi tidak berbagi dalam kepemimpinan komunitas Kristen [terutama dalam pelayanan tujuh Sakramen kecuali Sakramen Baptisan]; dan biarawan-biarawati [adalah mereka] yang berada di antara hirarki dan kaum awam, dengan memiliki elemen-elemen dari keduanya [hirarki dan kaum awam]. Dalam hubungan dengan tanggung jawab, biarawan-biarawati dianggap termasuk di dalam kalangan hirarki."[36]

Tanggung Jawab Hirarki dalam Politik Injil

Mesti dicatat bahwa Gereja sama sekali tidak membencipolitik dengan huruf kecil p. Sebaliknya, Gereja berpandangan positif terhadapnya asalkan tujuannya adalah untuk melayani kepentingan umum masyarakat dan menjunjung tinggi perhormatan martabat pribadi manusia. Tentang hal ini, para uskup di Puebla mengajarkan demikian:

> *Dimensi politik merupakan dimensi konstitutif dari semua makluk manusia dan aspek yang relevan dari kehidupan sosial manusia*. Ia [dimensi politik kehidupan manusia] memiliki sebuah aspek yang sifatnya merangkul semua orang karena tujuannya adalah kesejahteraan umum dari masyarakat. Tapi itu tidak berarti bahwa iamerangkum seluruh skala hubungan sosial. *Jauh dari membenci kegiatan politik, iman Kristen menghargainya dan menjujungnya sangat tinggi* [Kutipan di atas adalah dari saya].[37]

Gereja akan menggunakan jurus Politik Injil ketika kesejahteraan bersamadan martabat manusia berada dalam bahaya. Jika hal ini terjadi, Gereja memiliki tanggungjawab untuk memaklumkan sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat dunia dan bagi kaum miskin khususnya. Gereja bisa secara profetis mengecam apa saja yang bertentangan dengan kemanusiaan seperti ketidakadilan sosial-ekonomi, penindasan terhadap kaum miskin, pemiskinan terhadap kaum miskin, eksploitasi berlebihan terhadap alam ciptaan dan aplikasi penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengorbankan manusia sendiri dan merusakkan alam ciptaan.Gereja memiliki tugas kenabian untuk mempromosikan dan membela martabat manusia, hak-hak sosial, ekonomi, budaya dan politik dari setiap anggota masyrakat serta hak-hak alam ciptaan untuk tidak disalahgunakan. Selain itu, hirarki Gereja secara profetis membaca tanda-tanda zaman dan menafsirkannya dalam terang nilai Injil kasih.[38]

Politik Injil Bukan Sebuah Nostalgia atas Kekuasaan yang Telah Hilang

Keterlibatan Gereja dalam urusan dunia bukan sebuah nostalgia atas sebuah kekuasaan yang telah hilang seperti yang diklaim tanpa dasar oleh sejumlah orang.[39] Sebaliknya, ia lahir dari keprihatinanterhadap keluarga umat manusia yang tersiksa oleh semakin meningkatnya ketidakadilan sosial-ekonomi dan kekhawatiran atas rumah bersama seluruh umat manusia – planet bumi – yang saat ini berada dalam bahaya kerusakan hampir tak terkendali. Paus Francis dalam Himbauan Apostolik *Evangelii Gaudium* menolak sebuah gagasan Gereja yang tertutup dalam dirinya sendiri dan suara sejumlah orang bahwa Gereja harus mengekang diri untuk tidak boleh terlibat dalam

urusan-urusan dunia – ekonomi dan politik – dan hanya membatasi dirinya pada urusan keagamaan*e*seperti pelayanan sakramen dan menyiapkan jiwa-jiwa nyamasuk surga. Sebaliknya kata Paus Fransiskus:

> Sudah tak mungkin lagi untuk mengklaim bahwa agama seharusnya dibatasipada ranah privat dan bahwa Gereja ada hanya untuk mempersiapkan jiwa untuk surga .....Tidak ada orang yang bisa menuntut bahwa agama seharusnya diturunkan ke tempat suci bagian dalam dari kehidupan pribadi seseorang, tanpa ada pengaruhnya pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tanpa mmempedulikan kesehatan lembaga-lembaga sipil, tanpa sebuah hak untuk menawarkan sebuah pendapat tentang peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi masyarakat ... Sebuah iman yang otentik – yang tidak pernah nyaman atau iman yang tidak melulu sebagai urusan pribadi semata-mata – selalu melibatkan sebuah keinginan untuk mengubah dunia, mentransmisi nilai-nilai, mewariskan planet bumi ini dalam keadaan yang lebih baik dari yang kita miliki sekarang .... Jika memang "tata masyarakat dan negara yang adil merupakan tanggungjawab sentral dari politik", maka Gereja "tidak dapat dan tidak bisa berpangku tangan dalam perjuangan menegakkan keadilan". Semua orang Kristen, termasuk pastor-pastor mereka, dipanggil untuk menunjukkan kepedulian untuk membangun dunia yang lebih baik.[40]

Politik Injil Tidak Menawarkan Hal-hal Praktis tapi Bimbingan Moral dan Etik

Akan tetapi dalam melaksanakan politik Injil,hierarki Gereja tidak mempunyai tanggungjawab teknis.[41] Paus, para uskup, imam, biarawan dan biarawati, melaluisuara kenabian merekayang dipandu oleh seluruh ajaran sosial Gereja, tidak dapat menawarkan hal-hal praktis untuk dilakukan. Mereka juga tidak berniat menjalankan ataupun mengambilalih struktur sosial, ekonomi dan politik dunia yang tak adil. Berdasarkan pemikiran ini,dalam Eksiklik *Remptoris Missio* (1990),Yohanes Paulus IImencela kesenjangan antara keterbelakangan (*dehumanizing underdevelopment*) beberapa negara berkembang dewasa ini dan kemajuan yang berlebihan (*overdevelopment*) yang telah dicapai beberapa negara maju. Menurut Paus, kesenjangan ini disebabkan oleh model ekonomi yang memperlebar kesenjangan antara mereka yang mendapatkan keutungan dari sistem ekonomi ini dan mereka yang tak bisa mendapatkannya. Dan terhadap ketakdilan ini, Yohanes Paulus II mengatakan bahwa Gereja tidak dapat menawarkan solusi-solusi konkret. Alasannya, hal ini bukan ranah Gereja untuk melakukannya. Yohanes Paulus dua menulis: "Berkarya secara langsung di bidang ekonomi, teknik dan politik atau memberi sumbangan secara material bagi pembangunan bukan merupakan misi Gereja. Sebaliknya, misi Gereja yang paling utama adalah menawarkan manusia sebuah kesempatan untuk tidak "memiliki lebih banyak" (*to have more*) tapi menjadi "lebih" (*to be more*) dengan membangkitkan hati nurani mereka melalui Injil."[42] Atau di *Ecclesia in Asia* (1999) ia juga menulis:

> Dalam upaya untuk membuat perubahan ini..., "Gereja tidak memiliki solusi teknis untuk ditawarkan", tetapi "menawarkan kontribusi utama untuk solusi dari masalah pembangunan yang mendesak ini ketika ia [Gereja] menyatakan kebenaran tentang Kristus, tentang dirinya sendiri dan tentang manusia, sambil menerapkan kebenaran ini di dalam sebuah situasi konkrit" [bdk *Sollicitudo rei socialis* 41]. Karena, pembangunan manusia tidak pernah hanya merupakan sebuah persoalan teknis atau ekonomis; lebih dari itu, secara fundamental pembangunan berhubungan dengan persoalan manusia dan moral.[43]

Benediktus XVI dalam *Deus Caritas Est* dan Paus Francis dalam *Evangelii Gaudium* juga mempunyai sikap yang sama tentang hal ini. Kedua paus ini berpendapat bahwa bukan merupakan tanggungjawab langsung Gereja untuk menemukan dan menawarkan solusi konkret dari masalah ekonomi dunia. Sebaliknya, itu adalah tanggungjawab langsung dari negara dan seluruh masyarakat . Tugas utama Gereja sebagai sebuah lembaga kenabiana dan sebagai bagian integral dari masyarakat dunia adalah menawarkan kesadaran moral dan bimbingan di bidang etika bagi struktur sosio-ekonomi dan politik. Inilah yang merupakan kontribusi khusus dari Gereja dan ini merupakan tugas

profetisnya yang membebaskan. Tentang hal ini, masing-masing pausmenulis:

> Tata masyarakat dan Negara yang adil adalah sebuah tanggungjawab utama dari politik. Seperti pernah dikatakan St Agustinus, sebuah Negara yang tidak diperintah menurut prinsip keadilan akan menjadi hanya sekelompok pencuri: "*Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia*" [bdk.*De Civitate Dei*, IV, 4: CCL 47, 102.] ..... Keadilan adalah tujuan dan kriteria intrinsik dari semua politik. Politik adalah lebih dari sekadar mekanisme untuk mendefinisikan aturan kehidupan publik: asal-usul dan tujuan dari semua politik mesti ditemukan dalam keadilan, yang dari kodratnya berhubungan dengan etika. Negara,... harus bergumul dengan setiap pertanyaan tentang bagaimana keadilan dapat dicapai di sini dan sekarang. .... Di sinilah ajaran sosial Katolik memiliki tempatnya: ia [ajaran sosial Gereja Katolik] tidak berniat memberikan sebuah kekuasaan kepada Gereja atas Negara. Bahkan ia juga bukan merupakan suatu upaya untuk memaksakan pada mereka yang tidak seiman dengan Gereja dan cara berperilaku yang hanya tepat untuk iman. Tujuan ajaran sosial Gereja adalah hanyabantu memurnikan akal budi dan berkontribusi,..., untuk... pencapaian dari apa yang adil ..... Bukan merupakan tanggungjawab Gereja untuk membuat ajaran ini berhasil dalam kehidupan politik. Sebaliknya, Gereja hanya berkeinginan untuk membantu membentuk hati nurani dalam kehidupan politik dan untuk merangsang wawasan yang lebih luaske dalam persyaratan-persyaratan yang otentik dari keadilan serta kesiapan yang lebih besar untuk bertindaksesuai dengannya, bahkan sekalipun hal ini mungkin akan melibatkan konflik dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Membangun tatanan sosial dan masyarakat sipil yang adil, di mana setiap orang menerima hanya apa yang menjadi haknya, merupakan tugas penting yang setiap generasi harus ambil bagian secara baru lagi. Sebagai sebuah tugas politik, ini tidak dapat menjadi tanggungjawab langsung dari Gereja. Namun, karena politik juga merupakan sebuah tanggungjawab manusia yang paling penting, Gereja juga berkewajiban untuk menawarkan, melalui pemurnian akal budi dan melalui pendidikan etik, kontribusinya yang khusus terhadap pemahaman akan syarat-syarat keadilan dan pencapainya secara politik.Gereja tidak dapat dan tidak harus menaruh di atas pudaknya pertarungan politik untuk mewujudkan masyarakat yangadil. Gereja tidak dapat dan tidak boleh menggantikan [peran]Negara. Namun pada saat yang sama Gereja tidak dapat dan tidak boleh tetap tinggal di pinggir dalam perjuangan untuk keadilan. Gereja harus memainkan perannya melalui argumen yang rasional dan Gereja harus membangunkan kembali energi spiritual yang tanpanya keadilan tidak bisa menang. Sebuah masyarakat yang adil harus menjadi tujuan yang harus dicapai oleh politik, [dan] bukan oleh Gereja. Namun promosi keadilan melalui upaya untuk mewujudkan keterbukaan pikiran dan keinginan akan kebaikan bersama (*common good*) adalah sesuatu yang menjadi keperihatinan sangat dalam dari Gereja.[44]

> Baik Paus maupun Gereja tidak memiliki monopoli mengenai interpretasi atas realitas-realitas sosial atau usulan-usulan solusi dari masalah-masalah kontemporer. Di sini saya bisa mengulang pengamatan yang mendalam dari Paus Paulus VI: "Dalam menghadapi situasi yang sangat beragam seperti ini, sulit bagi kita untuk mengucapkan sebuah pesan yang terpadu dan mengajukan sebuah solusi yang memiliki validitas universal. Ini bukan ambisi kami, juga bukan misi kami. Terserah kepada komunitas-komunitas Kristiani untuk menganalisis dengan objektivitas yang tepat untuk negara mereka sendiri "[Dikutip dari Paul VI, *Octogesima adveniens*, 14 Mei 1971, No 4)].[45]

Sekarang seharusnya sudah semakin jelas apa yang dimaksudkan dengan Politik Injil Gereja. Ia adalah misi profetis Gereja untuk membebaskan masyarakatmanusia dan rumah bersamanya planet bumi (*common home*) dengan menawarkan sebuah bimbingan moral bagistruktur sosio-ekonomi dan politik.Sepertipara nabi dan Yesus dalam Kitab Suci , hierarki Gereja mempunyaisebuah tanggungjawab etis. Dalam ruang sosial, ekonomi dan pembangunan manusia, Gereja secara profetis dapat mengatakan jika sesuatu itu benar atau salah, adil atau tidak adil dalam terang nilai-nilai Injil seperti cinta dan keadilan.

Sehubungan dengan ini Karl Peschke dengan jelas mengatakan:

> Gereja "memiliki hak untuk memberikan penilaian moral, bahkan termasuk hal-hal yang menyentuh tatanan politik, setiap kali hak-hak asasi pribadi manusia atau keselamatan dari jiwa-jiwa membuat penilaian semacam itu diperlukan" (GS 76). Dia [Gereja] memiliki hak dan kewajiban untuk menyatakan keprihatinannya atas kejahatan yang terjadi dalam tatanan sosial, dan dia tidak dapat dituduh mencampuriurusan politik jika dia mencela pelanggaran-pelanggaran hukum moral di panggung politik. Pengakuan akan fungsi ini dari Gereja oleh negara sama sekali tidak berarti bahwa negara tunduk kepada Gereja tetapi pengakuan subordinasi dari keduanya – Gereja dan negara – kepada Allah.[46]

Injil politik dari Gereja – berpolitik tanpa harus secara langsung menjalankan politik dan tatanan sosial – mengambil modelnya dari misi pembebasan para nabi di Alkitab Perjanjian Lama dan Yesus sendiridi dalam Alkitab Perjanjian Baru. Baik para nabi maupun Yesus melancarkan kritik kenabian mereka yang liberatif dan kecaman terhadap struktur-struktur sosio-ekonomi yang tidak adil pada zaman mereka tanpa mengambil alih tatanan sosial atau membangun kode dari norma-norma sosial-ekonomi dan politik bagi masyarakat.

Politik Injil dan Soal Pemisahan antara Agama dan Negara

Dimensi politik dari iman Kristiani seharusnya tidak disalahmengeri dengan prinsip tentang pemisahan antara agama dan politik atau antara Gereja dan negara. Gereja dalam Konstitusi Pastoral tentang Pastoral Gereja di dalam Dunia Modern, *Gaudium et Spes*, khususnya pada Bab 4 dengan subjudul "Kehidupan dari Komunitas Politik," memang membuat sebuah penegasan tentang pemisahan antara dua buah entitas. Dalam dokumen *Gaudium et Spes* iniGereja mengatakan: "Gereja dan komunitas politik [politik negara atau tata kepemerintahan duniawi] di dalam ranah mereka masing-masing adalah otonom dan independen satu sama lain."[47] Akan tetapi, kalau dibaca dengan teliti, dalam satu baris kalimat sebelum kutipan ini, Gereja juga dengan jelas mengatakan bahwa karena kekhususan misi yang dimilikinya Gereja tidak dapat diidentifikasi dengan politik partisan apapun atau tidak bisa terikat oleh sistem politik apapun: "Gereja, oleh karena alasan peran dan kompetensinya, tidak dapat diidentifikasi dengan cara apapun dengan komunitas politik apapun ataupun tidak terikat oleh sistem politik apapun. Ia [Gereja] adalah sekaligus sebuah tanda dan sebuah tempat perlindungan dari sifat transenden dari pribadi manusia."[48]

Membaca dengan teliti bagian kedua dari *Gaudium et Spes* No. 76 yang baru saja dikutip di atas, orang seharusnya tidak sulit untuk memahami hakekat Gereja yang dimaksudkan oleh doktrin pemisahan antara Gereja dan negara. Yakni bahwa karena hakekat Politik Injil yang berakar pada model keterlibatan sosial politik dari para nabi dalam Kitab Kitab Suci Perjanjian Lama dan dari Yesus dalam Kitab Suci Perjanjian Baru, Gereja institusional, yang diwakili oleh hierarkinya– paus, uskup, para imam, diakon dan biarawan-biarawati – tidak dapat secara langsung terlibat dalam politik partisan atau politik dengan huruf kecil p.[49]

Gereja tidak dapat secara langsung menginjili tata dunia pemerintahan negara dengan menjalankan atau mengambilalih urusan-urusan sosial, ekonomi dan politiknya. Paus, para uskup, imam atau diakon tidak bisa memangku jabatan publik seperti presiden, perdana menteri, menteri departemen, gubernur, bupati, walikota, DPR atau anggota sebuah sistem peradilan. Sebaliknya, Gereja dan hierarkinya harus tetap menjadi tanda persatuan, sambil terlibat dalam urusan sosial politik dari tata pemerintahan negara dengan memberikan sebuah kesadaran moral dan pedoman etik yang didasarkan pada nilai-nilai Injil: cinta, kesederajatan, solidaritas, persaudaraan dan keadilan bagi semua orang dan bagi setiap pribadi manusia.Pada saat yang sama Gereja secara profetis mengecam setiap sistem sosial ekonomi dan politik dari pemerintahan negara yang melanggar martabat peribadi manusia dan membahayakan integritas alam ciptaan.

Tanggungjawab Kaum Awam Terhadap Politik Injil

Menurut ajaran sosial Gereja Katolik, terlibat secara langsung dalam kegiatan politik partisan adalah panggilan yang tepat bagi umat awam. Ini adalah komitmen misioner dan kenabian mereka sebagai sebuah usaha untuk mempraktekan iman mereka. Selain itu, motivasi dari komitmen mereka dalam politik partisan tidak harus bersifat gerejawi tetapi harus terutama bertujuan untuk melayani kepentingan umum (*bonum communae, common good*)[50] seluruh warga negara dari negara mereka apapun suku, agama, daerah ataupun rasnya. Konsili Vatikan II, dalam *Gaudium et Spes* No. 75, memberikan beberapa petunjuk bagi sikap-sikap Kristiani yang benar terhadap tata politik dan negara yang harus dimiliki politisi awam Kristiani seperti yang dirangkum oleh Roger Charles dan Drostan Maclaren:

> *Pertama*, orang-orang Kristen harus bersikap patriotik [mencintai bangsa dan negara sendiri] namun, pada saat yang sama, mereka mesti tetap menyadari persatuan seluruh umat manusia; *kedua,* dalam politik, mereka harus pertama-tama mendedikasikan diri untuk kesejahteraan umum; *ketiga,* mereka harus menghormati orang-orang yang berbeda [pendapat dan pendirian] dengan mereka dalam urusan politik, dan *keempat* dan terakhir, mereka harus ingat bahwa [kepentingan] politik partai, sekalipun dapat diterima, tidak pernah boleh berada di atas kepentingan umum.[51]

Konstitusi Dogmatis tentang Gereja dari Konsili Vatikan II, *Lumen Gentium* No.33, mengakui peranan penting kaum awam. Melalui Sakramen Pembaptisan dan Sakramen Pengurapan Krisma, semua umat awam Katolik secara langsung ditugaskan oleh Tuhan sendiri untuk berpartisipasi dalam misi penyelamatan Allah yang dimandatkan kepada Gereja.[52] Karena panggilan dan pengutusan langsung oleh Tuhan sendiri, maka "aktivitas dari *kaum awam bukan merupakan sebuah perpanjangan dari tugas hirarki* [Gereja: Paus, pastor dll]. Umat awam Katolik mempunyai tempatnya tersendiri di dalam Gereja dan mereka harus bertindak sesuai dengan panggilannya yang khusus ini. *Umat awam bukan seorang pribadi sekular*. Seorang umat awam Katolik adalah seorang anggota Gereja yang berada dan hidup di dunia sekular dan memiliki mandat langsung dari Yesus Kristus" [huruf miring berasal dari saya].[53]

Menurut para uskup Katolik di Puebla, tempat aktivitas dari umat awam adalah di tengah dunia.[54] Dari kegiatan-kegiatan mereka dalam urusan-urusan duniawi, aktivitas politik mereka perlu mendapat penekanan khusus di mana mereka berpartisipasi dalam berbagai proses politik seperti memegang kepemimpinan dalam partai politik dan memegang jabatan-jabatan publik.[55] Melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan politik, kaum awam, di dalam dunia yang ditandai oleh masalah ketidakadilan yang akut, tidak dapat membebaskan diri mereka dari komitmen untuk mempromosikan keadilan dan kebaikan bersama, yang dipandu oleh nilai-nilai Injil dan ajaran sosial Gereja. Bagi semua orang Kristen, tugas mereka tidak hanya mengecam ketidakadilan, tetapi mereka juga terutama harus benar-benar menjadi saksi dan agen dari praktek keadilan.[56]

Akhirnya, dalam menjalankan kegiatan politik ini, umat awam tidak perlu mendapatkan dukungan atau restu langsung atau berkat dari uskup atau imam mereka untuk menjalankan sebuah aktivitas politik yang sungguh khas Kristen dan yang diinspirasi oleh nilai-nilai Injil: kasih, keadilan, kejujuran, solidaritas dan seterus Konstitusi Dogmatis tentang Gereja dari Konsili Vatikan II, *Lumen Gentium* No.33, mengakui peranan penting nya. Aktivitas politik mereka dari kodratnyabesifat Kristen karena semua orang Kristen awam adalah anggota sejati dari Gereja dengan misi mereka khas di dalam dunia yang ditugaskan secaralangsung oleh Allah sendiri.[57] Dengan kata lain, agar bisa menjadi para politisi yang benar atau para pegawai negeri sipil dan warga negara yang baik untuk membangun masyarakat yang adil, maka orang-orang Kristen Katolik tidak perlu mendapatkan berkat atau perintah dari hierarki Gereja – paus, uskup atau imam – karena mereka semua memiliki menerima misi ini dari Allah sendiri pada sakramen baptisan.

Dengan mengingat semua ajaran sosial Gereja ini, maka fakta tentang banyaknya umat awam Kristen Katolik yang telah gagal menjadi garam dan terang Kristus di dalam dunia melalui hidup sebagai kaum awam, dan beberapa politisi Kristen malahan telah menjadi protagonis dari penindasan terhadap orang miskin dengan membangun atau mendukung struktur-struktur sosial ekonomi dan politik yang tidak adil, koruptif dan destruktif, merupakan sebuah skandal besar dari panggilan hidup umat awam. Tentang hal ini Paus Francis belum lama ini mengatakan: "Bahkan jika banyak [umat awam Katolik] sekarang terlibat dalam pelayanan pastoral kaum awam [seperti misionaris awam], keterlibatan ini belum terlihat di dalam penetrasi nilai-nilai Kristiani di dalam sektor sosial, politik dan ekonomi."[58]

KESIMPULAN

Hingga di sini telah menjadi jelas bahwa politik dalam artinya yang asli, luas dan mulia tidak lain dari pengorganisasian dan manajemen dari kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Mendukung model politikdalam arti mulia ini dan mengutuk patologi-patologinya merupakan alasan utama mengapa Gereja dari kodratnya bersifat politik dan harus berpolitik. Gereja sama sekali tidak menentang sistem sosial ekonomi dan politik dunia apapun ketika sistem-sistem ini adil dan manusiawi, menghormati hak-hak asasi, melindungi martabat pribadi manusia dan mempromosikan kepentingan umum dari seluruh masyarakat tanpa ada pengecualian karena perbedaan asal, suku, agama atau ras. Inti dari komitmen misioner Gereja adalah untuk mempromosikan cinta, keadilan, kesetaraan, persaudaraan dan solidaritas di antara seluruh keluarga umat manusia dan akan berdiri melawan semua sistem sosial ekonomi dan politik yang tidak adil, menginjak harkat martabat manusia dan mengeksploitasi alam ciptaan secara tidak bijaksana dan berlebihan.

Seluruh ajaran sosial Gereja yang tersebar di berbagai ensiklik, dokumen konsili, surat apostolik, desakan apostolik Paus atau dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh para uskup Katolik seperti yang berkaitan dengan usaha pembebasan orang-orang miskin, promosi pemeliharaan alam ciptaan dan proposal bagi model pembangunan yang ramah lingkungan dan lebih manusiawi merupakan sejumlah ekspresi otentik dari politik Injil Gereja. Ini adalah misi kenabian Gereja bagi seluruh masyarakat manusia dan rumah kediamannya bersama (*common home*), yakni planet bumi, dengan menawarkan sebuah kesadaran moral dan pedoman etikabagi struktur-struktur sosio-ekonomi dan politik dunia. Seperti para nabi di dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan Yesus dalam Kitab Suci Perjanjian Baru, Gereja, khususnya hirarki, memiliki tanggung jawab etis. Dalam lingkup sosial, ekonomi dan pembangunan manusia, dapat secara profetis menyatakan apakah sesuatu itu benar atau salah, adil atau tidak adil dalam terang nilai-nilai Injil seperti cinta, keadilan, perdamaian, persaudaraan atau solidaritas yang seharusnya meraja di dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Sedangkan keterlibatan secara langsung dalam politik partisan adalah panggilan yang khas dari kaum awam. Melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan politik, kaum awam tidak dapat dibebaskan dari komitmen untuk mempromosikan keadilan dan kebaikan bersama, yang dituntun oleh nilai-nilai Injil dan ajaran sosial Gereja. Semua orang Kristen, karenanya, tidak hanya mengecam ketidakadilan tetapi juga harus memberikan kesaksian dan agen dari politik Injil kasih, keadilan, solidaritas dan persaudaraan sejati di antara sesama seluruh umat manusia yang tentunya harus dimulai dari negara mereka masing-masing.

Alexander Jebadu,

Lulusan Program Doctor di Pontificia Universitas Urbaniana, Roma. Mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Katolik (STF / TK) Ledalero.
E-mail: dosenstfk17@gmail.com.

CATATAN AKHIR

[1] Untuk informasi lanjut tentang revolusi ekonomi industri pada abad 18 dan 19 yang tidak hanya membawa kemajuan bagi masyarakat manusia tapi juga ketidadilan sosial bagi masyarakt miskin terutama kaum buruh, bisa baca, misalnya, JohnKennetth Galbraith, *The Age of Uncertainty: A History of Economic Ideas and Their Conse-qu*ences (Boston, MA: Houghton Mifflin Company, 1977), Karol Marx and Frederic Engels, *The Communist Manifesto* – first published in 1847, New York, London, Montreal and Sydney: Pathfinder, 2012) atau Karl Marx, *Capital: A Critical Analysis of Capitalist Production*, Volume 1 and 2 (London: Wordsworth Classics of World Literature, 2013 – first published in 1867).

[2] Ecumenical Council of Vatican II, Church's Pastoral Constitution *Gaudium et Spes* (Roma, 7 Desember 1965), 1.

[3] Ecumenical Council of Vatican II, 42.

[4] Ecumenical Council of Vatican II, 90.

[5] *Discours du Pape Paul VI Aux Membres et Consulters de "Iustitiae et Pax"*, 20th of April 1967.

[6] John Paul II, KonstitusiApostolik *Pastor Bonus* of 1988 (Rome, 28 June 1988), 142-143.

[7] CELAM II, *Human Promotion: Justice* (Medellìn, 6th of September 1968), 21.

[8] Untuk mendapat informasi lengkap tentang industry pertambangan di Flores dan kompleksitas masalahnyas, bisa lihat JPIC-OFM Indonesia, *Mencegah Tanah Manggarai Hancur: Investigasi JPIC OFM Indonesia tentang Pertambangan di Manggarai dan Dampaknya Kini dan di Masa Depan* (Jakarta: Sekretariat JPIC-OFM Indonesia, 2008), Alexander Jebadu dkk (eds.), *Pertambangan di Flores-Lembata: Berkah atau Kutuk?* (Maumere/Flores: Penerbit Ledalero, 2009), Ferdy Hasiman, *Monster Tambang: Gerus Ruang Hidup Warga NTT* (Jakarta: JPIC-OFM Indonesia, 2014) atau Alexander Jebadu, *The Impact of Ecological Exploitation on People and Nature: A Missiological Investigation on Extractive Industry with a Case Study in Flores-Indonesia* (*dissertasi doktoral*, Rome: Pontifical Urbanian University, 2014) khususnya Bab II "Mining Industry in Flores and Its Problems," 69-156.

[9] Leo Boff, *Church, Charism and Power: Liberation Theology and the Institutional Church* (London: SCM Press Ltd, 1985), 26.

[10] Egiguren Antonio OFM, "Vatican II and Mission: Some Comments from the Periphery" in *SEDOS Bulletin* September-October 2012, Volume 44, No. 9/10, pp. 291-292. Keterlibatan Gereja dalam politik yang membuat Gereja tidak dipercaya dalam kalimat pertama dari Egiguren dalam kutipan ini adalah politik dengan huruf p kecil.Apa persis yang dimaksudkan dengan politik dengan huruf p kecil, kita akan kembali lagi kepada teman ini pada bagian lain dari artikel ini.

[11] Archbishop Oscar Romero, "The Political Dimension of the Faith from the Perspective of the Option for the Poor" dalam Henelly Alfred T. (ed.), *Liberation Theology: A Documentary History* (Maryknoll, New York: 1990), pp. 298-299.

[12] Archbishop Oscar Romero, "The Political…", 299.

[13] Archbishop Oscar Romero, "The Political…", 300.

[14] Archbishop Oscar Romero, "The Political…", 301.

[15] Leo Boff, *Church: Charism*, 26

[16] Gonzalo Medina Villagràn, "Mancharse Las Manos en El Escenario Polìtico," dalam *Saltarrae: Revista de Teologìa Pastoral* (Santander, Espaňa, No. 1.180, Julio-Agosto 2013), 620

[17] Archbishop Oscar Romero, "The Political…", 298.

[18] Archbishop Oscar Romero, "The Political…", 298.

[19] Catholic Bishop Worl Synod , *Justice in the World* (Roma, 6 November 1971), 6 dan 36.

[20] Leo Boff, *Church: Charism*, Ibid., p. 23.

[21] Puebla Document, *Evangelization at the Present and in the Future of Latin America* (Puebla Mexico, Januari– Februari 1979), No. 516.

[22] Leo Boff, *Church: Charism*, 26.

[23] Leo Boff, *Church: Charism*, 26

[24] Leo Boff, *Church: Charism*, 27.

[25] Puebla Document, *Evangelization,* 521.

[26] Puebla Document, *Evangelization,* 522.

[27] Leo Boff, *Church: Charism*, 27

[28] Puebla Document, *Evangelization,* 515. Teks asli berbahasa Spanyol. Terjemahan Indonesia adalah dari saya.

[29] Puebla Document, *Evangelization,* 558.

[30] Leo Boff, *Church: Charism*, 27-28.

[31] Leo Boff, *Church: Charism*, 28.

[32] Puebla Document, *Evangelization,* 523. Teks asli berbahasa Spanyol. Terjemahan Indonesia berasal dari sayha.

[33] Puebla Document, *Evangelization,* 524.

[34] Puebla Document, *Evangelization,* 527.

[35] Puebla Document, *Evangelization,* 528.

[36] Leo Boff, *Church: Charism*, 28.

[37] Puebla Document, *Evangelization,* 513-514.

[38] Bdk. Leo Boff, *Church: Charism*, 28.

[39] Gaglianone Renato, seorang professor pada Fakultas Misiologi di Universitas Kepausan Urbaniana di Roma menceriterakan bahwa dalam beberapa decade terakhir ini, khususnya sejak Konsili Vatikan II (1962-1965) hinngga hari ini, sejumlah orang heran mengapa Gereja Katolik begitu menaruh minat terhadap masalah-masalah dunia seperti ekonomi, keadilan sosial, bioethik dan politik dan Gereja tidak membatasi karya pelayanan misionernya hanya pada hal-hal keagamaan seperti melayani hanya umatnya sendiri saja – yakin umat Katolik. Khususnya di Italia, Renato ceriterakan, sejumlah awam Katolik kerap heran dan menunjukkan sikap tidak senang atas Magisterium Gereja yang sering masuk ke dalam "masalah-masalah profane" (*profane matters*). Beberapa dari mereka bahkan menilai misi Gereja dalam perlbagai persoalan dunia sebagai semacam sebuah nostalgia terhadap sebuah kekuasaan yang sudah hilang dan ingin untuk berkuasa kembali. Mesti dikatakan penilaian ini sama sekali tidak benar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Renato Gaglianone, "Evangelizzione, promozione umana e sviluppo: impegno per la liberazione, la giustizia e la pace" (*manuscripts*)

(Roma: Pontificia Università Urbaniana, 2011), p. 1.

[40] Pope Francis, *Evangelii Gaudium* (Roma, 24 November 2013), 182-183.

[41] Bdk. Leo Boff, *Church: Charism*, 28.

[42] Pope John Paul II, *Redemptoris Missio* (Roma, 7 December 1999), 59.

[43] Pope John Paul II, *Ecclesia in Asia* (Diberikan di New Delhi, India, 6 November, 1999), 32.

[44] Benediktus VI, *Deus Caritas Est*(Roma, 25 Desember 2005), 28.

[45] Pope Francis, *Evangelii Gaudium*, 184.

[46] Karl Henry Peschke, *Christian Ethics: Moral Theology in the Light of Vatican II,* Vol. II: *Special Moral Theology*(Birmingham: John F. Neale, 2000), 625.

[47] Ecumenical Council of Vatican II II, Pastoral Constitution of the Cbhurch ini Modern World *Gaudium et Spes* (Roma, 7 Desember 1965), 76. Henry Peschke menyebut sejumlah konsekwensi hukum dari doktrin pemisahan Gereja/agama dan negara: "(I) Gereja memiliki hak untuk berkarya dan mengatur dirinya sendiri dalam sebuah kebebasan yang penuh yang tidak bisa dicampuri oleh negara….. (II) Gereja tidak memiliki kekuasaan politik apapun atas pemerintahan negara. Yang dimaksudkan dengan ini adalah bahwa Gereja tidak memiliki kekuasaan yuridis atas realitas pemerintahaan negara, meskipun Gereja memiliki kekuasaan untuk mengajar dalam hal-hal mengenai hormat terhadap hak-hak asasi manusia dan tatanan moral dalam kehidupan publik bermasyarakat…. (III) [Sebaliknya] negara juga tidak memiliki kekuasaan apapun atas hal-hal rohani dan keagamaan. Negara tidak berhak untuk mengontrok karya atau aktivitas Gereja yang didasarkan atas kepentingan negara. Benar bahwa pemerintah mesti "bertanggungjawab atas kehidupan keagamaan dari warganya dan membantunya sedapat munkin, karena fungsi dari pemerintah negara adalah untuk menjamin kesejahteraan bersama" (DH 3). (IV) Gereja mempunyai kekuasaan untuk mengajar, yang antara lain menawarkan hukum-hukum moral untuk menuntun kehidupan politik. Gereja mempunyak hak dan kewajiban untuk menyatakan keprihatinannya yang besar terhadap kejahatan-kejahatan yang ada dalam tatanan hidup sosial…" Untuk informasi lebih lanjut, lihat Peschke Henry, *Christian Ethics*, Ibid., pp. 623-625. Terlepas dari kenyataan bahwa prinsip pemisahan agama dan negara memiliki banyak keuntungannya baik bagi Gereja Katolik maupun bagi setiap negara di mana saja ada Gereja Katolik, mesti diingat juga bahwa doktrin ini pada mulanya dibuat secara khusus untuk mengakhiri keterlibatan politik secara langsung dari Paus atas negara Italia dan atas Eropa pada umumnya sejak Imperium Romawi runtuk pada abad V. Baik Roger Charles dan Drostan Maclaren di dalam karya mereka *The Social Teachings of Vatican II: Its Origin and Development* maupun Kenneth R. Himes dalam karyanya *Christianity and the Political Order: Conflict, Cooptation and Cooperation* berargumentasi bahwa Gereja, dalam hal ini khususnya Paus Roma, mulai memegang kekuasaan politik negara sejak abad V setelah Imperiun Romawi mengalami keruntuhan. Pada waktu itu Gereja merupakan satu-satunya organisasi sosial yang sanggup dan cukup dapat dipercaya untuk mengatur masyarakat dan tatanan politiknya, yang kemudian hari, setelah belajar pengalaman berabad-abad lamanya, yang sebagiannya dipicu oleh gerakan reformasi Gereja yang dimulai oleh Martin Luther pada abad XVI, Gereja perlahan-lahan melepaskan kekuasaan politik dengan huruf p kecil. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Charles Rodger SJ & Maclaren Drostan OP, *The Social Teaching of Vatican II: Its Origin and Development* (Oxford: Plater Publications/San Francisco: Ignatius Press, 1982), khususnya Bab 4: "The Ethics of Political Life," pp. 173-260 atau Himes Kenneth OFM, *Christianity and the Political Order*, Ibid., pp. 82-191. Mengenai kebersediaan Gereja untuk melepaskan kekuasaan politik dengan huruf p kecil, *Gaudium et Spes* dengan jelas menyatakan demikian: "Gereja, dari pihaknya, tidak menempatkan kepercayaannya pada privilese-privilese yang diberikan oleh penguasa sipil. *Gereja bahkan akan menyerahkan hak-hak tertentu yang telah diperoleh Gereja secara syah, jika hal itu jelas menunjukkan bahwa penggunaan hak-hak itu akan membuat kesaksiannya tidak tulus dan ragu* [italic dari saya, teks asli Inggris dan terjemahan Indonesia berasala dari saya) atau bahwa cara-cara hidup baru menuntuk pula metode-metode baru. Akan tetapi, pada setiap tempat dan waktu, Gereja seharusnya memiliki kebebasan yang sejati untuk memberi kesaksian tentang imannya, untuk mengjarkan ajaran sosialnya, untuk melaksanakan peranannya secara bebas di antara semua umat manusia, dan memberikan penilaian moral terhadap hal-hal yang menyangkut tata kehidupan umum terutama ketika hak-hak fundamental dari setiap pribadi manusiaatau karena keselamatan jiwa-jiwa manusia menuntutnyat." Untuk informasi lebih lanjut, lihat, *Gaudium et Spes,* 76.

[48] Ecumencial Council of Vatican II, Church's Pastoral Constitution, 76.

[49] Tapi juga mesti dicatat bahwa sebagai seorang pastor Katolik Indonesiat saya tidak dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan politik praktis atau dalam politik dengan huruf p kecil – sekadar meminjam kategori yang dibuat oleh Leo Boff. Hal ini semata-mata karena ketaatan saya terhadap ajaran hukum Gereja di bawah pimpinan tertingginya, Paus Roma, dan bukan karena dilarang oleh negara Indonesia. Sebagai seorang pastor Gereja Katolik Indonesia saya tetap memiliki hak-hak politik 100% untuk terlibat secara langsung dalam semua masalah sosial ekonomi dan politik Indonesia, termasuk hak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi bupati, walikota atau gubernur, dan tidak ada UU negara Republik Indonesia yang melarang saya untuk hal ini. Akan tetapi demi politik Injil dari Gereja yang ruang lingkup jangkauannya melampaui politik partisan yang dimainkan oleh partai-partai politik dari negara Republik Indonesia, saya juga bisa dengan bebas untuk tidak menggunakan hak-hak politik saya sebagai seorang warga NKRI 100% untuk terlibat dalam politik partisan. Dengan

demikian, pilihan saya untuk bersikap solider dengan orang miskin dan memperjuangkan keutuhan ciptaan dan pada saat yang sama mengutuk struktur-struktur sosial-ekonomi dan politik Indonesia dan dunia yang tidak adil merupakan pelaksanaan dari dimensi politik dari iman Kristiani saya yang disebut Politik Injil dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari hak-hak politik sipil saya sebagai seorang warga NKRI 100%. Prinsip yang sama ini berlaku terhadap setiap warga negara yang kebetulan sebagai pastor, bruder atau suster Katolik di negara mana saja di seluruh dunia.

[50] Charles Rodger SJ & Maclaren Drostan OP, *The Social Teaching of Vatican II:*, 224.

[51] Charles Rodger SJ & Maclaren Drostan OP, *The Social Teaching of Vatican II:*, 223.

[52] Ecumencial Council of Vatican II, Dogmatican Consitution of the Church, *Lumen Gentium*, Ibid. 33.

[53] Leo Boff, *Church: Charism*, 30

[54] Puebla Document, *Evangelization,* 789

[55] Puebla Document, *Evangelization,* 791.

[56] Puebla Document, *Evangelization,* 793

[57] Leo Boff, *Church: Charism*, 30

[58] Pope Francis, *Evangelii Gaudium,* 102.

DAFTAR RUJUKAN

BENEDICT VI, *Deus Caritas Est*(Roma, 25 Desember 2005), No. 28.

BOFF Leo, *Church, Charism and Power: Liberation Theology and the Institutional Church*. London: SCM Press Ltd, 1985.

CATHOLIC Bishop World Synod, *Justice in the World*. Roma, 6 November 1971.

CELAM II, *Human Promotion: Justice*. Medellìn, 6th of September 1968.

ECUMENICAL Council of Vatican II, Dogmatic Constitution of the Church, *Lumen Gentium*. Vatican City, Rome, 21st of November 1964.

ECUMENCIAL Council of Vatican II, Pastoral Constitution of the Church in Modern World *Gaudium et Spes* (Roma, 7 Desember 1965), No. 76.

EGIGUREN Antonio OFM, "Vatican II and Mission: Some Comments from the Periphery" in *SEDOS Bulletin* September-October 2012, Volume 44, No. 9/10.

DISCOURS du Pape Paul VI Aux Membres et Consulters de "Iustitiae et Pax", 20th of April 196

FRANCIS Pope, *Evangelii Gaudium*. Roma, 24 November 2013.

GAGLIANONE Renato, "Evangelizzione, promozione umana e sviluppo: impegno per la liberazione, la giustizia e la pace" (*manuscripts*). Roma: Pontificia Università Urbaniana, 2011.

HASIMAN Hasiman, *Monster Tambang: Gerus Ruang Hidup Warga NTT*. Jakarta: JPIC-OFM Indonesia, 2014.

HENELLY Alfred T. (ed.), *Liberation Theology: A Documentary History*. Maryknoll, New York: 1990.

HIMES Kenneth R., *Christianity and the Political Order: Conflict, Cooptation and Cooperation*. Maryknoll, New York: Orbis Books, 2013.

JEBADU Alexander dkk (eds.), *Pertambangan di Flores-Lembata: Berkah atau Kutuk*? Maumere/Flores: Penerbit Ledalero, 2009.

JOHN Paul Paulu II, Apostolic Constitution *Pastor Bonus*. Rome, 28 June 1988.

----------, *Ecclesia in Asia*. Declared in New Delhi, India, 6th of November, 1999.

----------, *Redemptoris Missio*. Roma, 7 December 1999.

JPIC-OFM Indonesia, *Mencegah Tanah Manggarai Hancur: Investigasi JPIC OFM Indonesia tentang Pertambangan di Manggarai dan Dampaknya Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Sekretariat JPIC-OFM Indonesia, 2008.

GALBRAITH JohnKennetth, *The Age of Uncertainty: A History of Economic Ideas and Their Consequ*ences. Boston, MA: Houghton Mifflin Company, 1977.

Konsili Ekumenis Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*.Roma, 7 Desember 1965.

MARX Karl and Frederic Engels, *The Communist Manifesto*. First published in 1847, New York, London, Montreal and Sydney: Pathfinder, 2012.

MARX Karl, *Capital: A Critical Analysis of Capitalist Production*. Volume 1 and 2, London: Wordsworth Classics of World Literature, 2013 – first published in 18.

MEDINA Gonzalo Villagràn, "Mancharse Las Manos en El Escenario Polìtico," dalam *Saltarrae: Revista de Teologìa Pastoral*. Santander, Espaňa, No. 1.180, Julio-Agosto 2013.

PESCHKE Karl Henry, *Christian Ethics: Moral Theology in the Light of Vatican II,* Vol. II: *Special Moral Theology*. Birmingham: John F. Neale, 2000.

PUEBLA Document, *Evangelization at the Present and in the Future of Latin America*. Puebla Mexico, Januari–Februari 1979.

RODGER Charles SJ & Maclaren Drostan OP, *The Social Teaching of Vatican II: Its Origin and Development* . Oxford: Plater Publications/San Francisco: Ignatius Press, 1982.

ROMERO Oscar, "The Political Dimension of the Faith from the Perspective of the Option for the Poor" dalam Henelly Alfred T. (ed.), *Liberation Theology: A Documentary History* (Maryknoll, New York: 1990.